



# **SINKRONISASI RTRW PERTAHANAN DENGAN RTRW PEMBANGUNAN DALAM MENGHADAPI ANCAMAN MILITER GLOBAL**

**PROF. DR. AGUS SUBAGYO, S.IP., M.SI.**

**GURU BESAR ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FISIP UNJANI**



# **SINKRONISASI RTRW PERTAHANAN DENGAN RTRW PEMBANGUNAN DALAM MENGHADAPI ANCAMAN MILITER GLOBAL**

**Oleh :**

**Prof. Dr. Agus Subagyo, S.IP., M.Si**

**Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional FISIP Unjani**

## **A. Pendahuluan**

Dalam perspektif historis, disiplin ilmu hubungan internasional, yang lahir ke muka bumi pada bulan April 1919 di Inggris, bertujuan untuk “mencegah peperangan” dan “menciptakan perdamaian” (*Knusten, 1992*). Sejarah peradaban manusia senantiasa dipenuhi oleh nuansa konflik, kekerasan, pertempuran dan peperangan (*McWilliams & Piotrowski, 1990*). Ketika terjadi peperangan, para diplomat berupaya sekuat tenaga melakukan negosiasi, persuasi, dan diplomasi untuk terciptanya perdamaian (*Popescu, 2010*). Hal ini sejalan dengan adagium terkenal: “sivis pacem para bellum”, “jika ingin berdamai maka bersiaplah untuk berperang” (*Abrahamsson, 2013*). “Perang” dan “Damai” adalah dua kata yang sangat *familier* bagi para penstudi hubungan internasional, khususnya para penganut paradigma realis.

Menurut para penganut paradigma realis, situasi dan kondisi dunia hubungan internasional bersifat “anarkis”, tidak ada “hukum internasional”, tidak ada “norma internasional”, dan tidak ada “etika-moral internasional” (*Waltz, 2008*). Yang ada adalah “hukum rimba”, “siapa yang kuat dia yang akan menang”, “power makes right”, “kekuatan menentukan hak”, “homo homini lupus”, “manusia / negara adalah serigala bagi manusia / negara yang lain” (*Donnelly, 2000*). *Mempelajari hubungan internasional adalah mempelajari “keteraturan” dalam dunia yang tidak “beraturan”* (*Siltz, 2009*). Dalam pandangan realis, setiap negara akan selalu mementingkan kepentingan nasional-nya (*national interest*) masing-masing tanpa mengindahkan kepentingan internasional (*international interest*), kepentingan

dunia, (*world interest*) dan kepentingan global (*global interest*) (Paleri, 2008). Negara yang lemah akan berpotensi untuk diinfiltrasi, dipenetrasi, diintervensi, diinvasi, dan diagresi negara yang kuat (Behr, 2007).

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah: Bagaimana setiap negara mensikapi situasi dunia yang “kompetitif”, “agresif”, “konflikual”, dan “anarkis” tersebut?. Paradigma realis menyarankan agar setiap negara mempersenjatai diri, meningkatkan kekuatan militer, memodernisasi alutsista militer, menambah personel militer, dan menyusun strategi / taktik / operasi militer dalam rangka kesiapsiagaan perang untuk mengantisipasi ancaman militer negara lain (Gottman, 1951). Perang memang harus dihindari, karena merugikan semua pihak, namun jika harus terjadi, maka setiap negara harus siap berperang, meskipun upaya diplomasi tetap dilakukan (Sidaway, James. 2001). Hal ini selaras dengan pendapat Carl von Clausewitz : “Perang adalah Diplomasi dengan cara lain”.

Lalu, bagaimana dengan Indonesia?. Banyak pihak menyatakan bahwa kecil kemungkinan bangsa Indonesia berperang dengan negara lain. Ancaman militer dari negara lain, dipandang oleh beberapa kalangan, lebih kecil dibandingkan dengan ancaman non militer dan ancaman hibrida. Pandangan ini tidak keliru, namun kurang tepat secara kontekstual karena akan membuat bangsa Indonesia “terlena” dan “lengah” serta kurang “siaga” dan kurang “waspada” dalam menghadapi ancaman militer global. Ditengah konstelasi global yang anarkis, **kesiapan** dan **kesiagaan** perang menghadapi **ancaman militer asing** harus dilakukan oleh bangsa Indonesia, terlebih lagi dengan meletusnya perang Nagorno Karabakh antara Armenia-Azerbaijan, perang Rusia-Ukraina yang belum usai, konflik abadi Israel-Palestina, dan meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan.

Dalam konteks ini, *just in case*, bangsa Indonesia diserang oleh militer asing atau Indonesia diperangi oleh negara lain, maka semua komponen bangsa Indonesia harus siap menghadapinya, kapanpun, dimanapun dan dalam kondisi apapun, sesuai dengan slogan: “**Indonesia Cinta Damai, Namun Lebih Cinta Kemerdekaan**”. Artinya, diperlukan kebijakan, strategi, dan upaya menghadapi ancaman militer global, menangkal serangan musuh, dan menangkis para agresor dari wilayah NKRI. Salah satu kesiapan dari sekian banyak kesiapan menghadapi peperangan

dan menangkal ancaman militer asing yang akan menyerang ke wilayah NKRI adalah “**penataan wilayah pertahanan**”.

Kebijakan penataan wilayah pertahanan, atau masyarakat umum lebih mengenal dengan istilah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pertahanan, selama ini sudah tertuang dalam dokumen “Rencana Wilayah Pertahanan” (RWP) dan “Rencana Rinci Wilayah Pertahanan” (RRWP), yang dulu lebih dikenal dengan istilah Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Pertahanan. Namun demikian, dalam kenyataan di lapangan, implementasi RTRW Pertahanan seringkali “tidak sinergi”, “tidak sinkron”, dan bahkan “bertentangan” dengan RTRW Pembangunan, dimana RTRW Pertahanan menitikberatkan pada “security approach” dan RTRW Pembangunan lebih mengutamakan pada “prosperity approach”.

Oleh karena itu, orasi ilmiah ini akan menyoroti tentang sinkronisasi RTRW pertahanan yang disusun oleh jajaran Kementerian Pertahanan dan TNI dengan RTRW pembangunan yang disusun oleh jajaran K/L terkait dan Pemerintah Daerah. Pertanyaan penelitian (*research questions*) yang diajukan adalah : **(1) Apa yang dimaksud dengan RTRW Pertahanan dan RTRW Pembangunan?; (2) Mengapa RTRW Pertahanan dengan RTRW Pembangunan Tidak Sinkron?; (3) Bagaimana Upaya yang harus dilakukan untuk Mensinkronkan RTRW Pertahanan dengan RTRW Pembangunan?.**

## **B. RTRW Pertahanan & RTRW Pembangunan**

Ditinjau dari aspek yuridis, UUD NRI Tahun 1945, pasal 30, ayat 2 menegaskan secara eksplisit bahwa sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia adalah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata). Selanjutnya, pasal 1, ayat 2, UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa sistem pertahanan negara Indonesia adalah sistem pertahanan semesta (Sishanta) (Puspitohadi, 2014). Dalam rangka mewujudkan sishanta, TNI sebagai komponen utama pertahanan negara, diberikan amanat dalam Pasal 7, ayat 2, butir 8, UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI untuk memberdayakan wilayah pertahanan (Subagyo, 2012).

Untuk mendetailkan pemberdayaan wilayah pertahanan ini, pemerintah mengeluarkan PP No. 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara, yang didalamnya terdapat RWP dan RRWP. Adapun Permenhan No. 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan RRWP dan Perpang TNI No. 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RRWP TNI, merupakan pedoman teknis yang harus dijadikan pegangan bagi TNI dan ketiga matra angkatan dalam menyusun RTRW Pertahanan untuk menghadapi ancaman militer global (Subagyo, 2016).

RTRW Pertahanan disusun, dirancang dan didesain oleh semua pemangku kepentingan yang ada di jajaran Kementerian Pertahanan dan TNI, yang kemudian dijabarkan secara rinci dan teknis operasional di satuan komando kewilayahan (Satkowil) TNI, khususnya pengemban fungsi teritorial di TNI AD (Binter TNI AD, dengan produk RRWP Darat), pengemban fungsi potensi maritim TNI AL (Binpotmar TNI AL, dengan produk RRWP Laut), dan pengemban fungsi potensi dirgantara (Binpotdirga TNI AU, dengan produk RRWP Udara), yang tentunya lebih berorientasi pada “security approach”.

Sedangkan RTRW Pembangunan diformulasikan dan dibuat oleh semua *stakeholder* terkait, khususnya jajaran Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah (Pemda), yang dijabarkan mulai dari tingkat Pusat, (berupa produk RTRW Nasional), sampai ke tingkat propinsi (berupa produk RTRW Propinsi) dan tingkat kabupaten / kota (berupa produk RTRW & RDTR Kab/Kota). RTRW Pembangunan ini lebih berorientasi pada “prosperity approach” dengan payung hukum berupa UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

### **C. Persepsi RTRW Pertahanan dan RTRW Pembangunan**

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, didapatkan data yang menunjukkan bahwa terdapat mis persepsi antara aparat birokrasi pemerintahan baik di jajaran pemerintah pusat (K/L), pemda propinsi dan kabupaten/kota dengan jajaran Kementerian Pertahanan dan TNI dalam memahami, memandang dan menyusun RTRW Pembangunan dengan RTRW Pertahanan (Subagyo, 2013). Proses

penyusunan RTRW Pembangunan oleh pemerintah daerah terlalu menekankan pada aspek pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, tanpa adanya upaya mengakomodasi kepentingan pertahanan-keamanan. Hal yang sama juga terjadi pada jajaran TNI yang menyusun RTRW Pertahanan terlalu menekankan kepentingan pertahanan-keamanan, sehingga kurang menghiraukan aspek kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari tabel berikut ini :

**Tabel. Persepsi RTRW Pertahanan & RTRW Pembangunan**

No	Persepsi Pemda	Persepsi TNI
1	Pemda memandang RTRW pertahanan hanya mementingkan <i>security approach</i> saja (seperti : aspek pertahanan semata, tanpa melihat aspek ekonomi, pembangunan & kesejahteraan).	TNI memandang RTRW Pembangunan hanya mementingkan <i>prosperity approach</i> saja (seperti: aspek pembangunan ekonomi, mengejar PAD, pertumbuhan ekonomi, tanpa melihat aspek pertahanan keamanan).
2	Pemda menilai RTRW pertahanan kurang ilmiah, kurang kongkret, dan kurang realistis untuk diterapkan.	TNI menilai RTRW Pembangunan banyak dikerjakan konsultan / kerjasama dengan pihak ketiga yang tidak paham situasi dan kondisi pertahanan keamanan wilayah.
3	Pemda menganggap RTRW Pertahanan cocok diterapkan ketika dalam keadaan darurat perang, sedangkan Indonesia potensi perang relatif kecil.	TNI menganggap RTRW Pembangunan pro pasar, terlalu mewedahi kepentingan komunitas bisnis, sehingga kadangkala dilanggar demi investasi & PAD semata.

Persepsi dan pandangan yang berbeda ini banyak terjadi di berbagai daerah / wilayah di Indonesia yang tentunya menimbulkan permasalahan tidak sinkronnya antara RTRW Pertahanan dengan RTRW Pembangunan, antara RTRW Propinsi, RTRW Kabupaten dan RTRW Kota dengan RRWP Darat, RRWP Laut, dan RRWP Udara. Aspek pertahanan-keamanan kurang terwadahi dan kurang terkomodasi dalam dokumen RTRW pembangunan sehingga menimbulkan benturan pada level teknis operasional di lapangan dengan RTRW pertahanan. Sebagai misal dalam dokumen RRWP Darat, khususnya RRWP Kodam, RRWP Korem, dan RRWP Kodim terdapat klasifikasi daerah, berupa daerah depan, daerah komunikasi, daerah

belakang, dan daerah pangkal perlawanan, yang tidak diketahui dan tidak dipahami oleh jajaran pemerintah daerah sehingga berakibat pada tidak selarasnya dan tidak terwadahnya dalam dokumen RTRW Propinsi dan Kabupaten/Kota tentang maksud, tujuan dan manfaatnya bagi kepentingan pertahanan (Subagyo, 2015).

Berikut ini akan diuraikan contoh persoalan di daerah yang menunjukkan perlunya sinkronisasi antara RTRW Pertahanan dengan RTRW Pembangunan. Di suatu kabupaten di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga terdapat “**gunung**” yang dalam konteks RTRW Pertahanan dan RTRW Pembangunan bisa dipandang / dipersepsikan secara berbeda. Ditinjau dari aspek **pariwisata**, gunung tersebut memiliki potensi wisata, berupa air terjun, puncak kawah, lereng gunung, yang bisa dikembangkan dan dibangun untuk wisata alam, *camping ground*, *outbound*, dan fasilitas pendukung obyek wisata alam yang akan menghasilkan PAD dan kesejahteraan masyarakat. Ditinjau dari aspek **ekonomi**, gunung tersebut terdapat potensi pertambangan dan sumber mineral lainnya, yang cocok untuk dilakukan eksplorasi pertambangan untuk menambah PAD dan mendukung APBD. Ditinjau dari aspek **bisnis**, potensi kekayaan alam dalam gunung tersebut bisa menjadi daya tarik untuk mengundang investor domestik dan investor asing agar membangun perusahaan penambangan sehingga menyerap tenaga kerja, meningkatkan pajak, menggenjot ekspor pertambangan, dan menambah volume perdagangan luar negeri. Akan tetapi, meskipun secara “pariwisata”, secara “ekonomi”, dan secara “bisnis” sangat menguntungkan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan kesejahteraan (*prosperity*), namun Ditinjau dari aspek **pertahanan**, gunung tersebut berada di wilayah perbatasan yang merupakan “daerah depan” yang rawan infiltrasi asing dan kejahatan lintas batas negara, yang tentunya dipersepsikan harus “steril” untuk kepentingan pertahanan sehingga cocok untuk dibangun markas TNI untuk “pengintaian”, “surveillance” dan lain-lain.

Contoh permasalahan di atas tentu harus bisa diselesaikan secara komprehensif dengan melihat dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Tidak bisa masalah ini hanya dilihat dari aspek *prosperity approach* saja, melainkan harus dipadukan pula dengan aspek *security approach*. Menafikan salah satu aspek dari kedua pendekatan tersebut akan berakibat pada kurang sempurnanya RTRW

yang disusun dan diimplementasikan di lapangan. (Syakir, 2016). Hal ini sejalan dengan basis konseptual-teoritik bahwa kedua paradigma / pendekatan tersebut harus sejalan, dimana pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (*prosperity approach*) tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya pembangunan pertahanan dan stabilitas keamanan (*security approach*). Demikian pula sebaliknya, pembangunan pertahanan dan keamanan (*security approach*) tidak akan berhasil dengan optimal tanpa adanya dukungan dari pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (*prosperity approach*) (Subagyo, 2015).

#### **D. Kebijakan “Amdal Pertahanan”**

Untuk menghindari benturan kepentingan antara Pemda dengan TNI dalam menyusun RTRW Pembangunan dengan RTRW Pertahanan, maka diperlukan langkah komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi untuk mensinkronkan penataan ruang yang mampu mengakomodasi dan mewadahi kepentingan kesejahteraan masyarakat (*prosperity interest*) dan kepentingan pertahanan keamanan (*security interest*). Salah satu “jembatan” untuk mewujudkan sinkronisasi RTRW Pembangunan dengan RTRW Pertahanan adalah dengan membuat kebijakan “Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Pertahanan”. Amdal pertahanan harus dapat diterapkan oleh setiap Pemda Propinsi dan Kabupaten/Kota sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi semua pengusaha, pelaku usaha, masyarakat, maupun semua komponen bangsa yang ingin memanfaatkan ruang dan wilayah untuk kepentingan bangunan yang bersifat vital dan strategis. Artinya, setiap pembangunan obyek vital nasional (Obvitnas), infra struktur fisik, sarana prasarana, jalan, gedung, pabrik, pelabuhan, bandara, pemukiman, Perkantoran, pusat perbelanjaan, dan lain-lain harus ada perijinan “amdal pertahanan” yang diterbitkan oleh Satkowil TNI setempat.

Sebagai contoh, pembangunan gedung pemerintahan, baik gedung DPRD, gedung Pemda, gedung milik pemerintahan daerah lainnya, maupun pembangunan obyek vital lainnya harus memenuhi Amdal Pertahanan, yakni gedung-gedung pemerintahan tersebut harus dibangun dengan memperhatikan aspek dan kepentingan pertahanan, dengan menyediakan fasilitas hellypad, bunker, dan ruang



bawah tanah yang anti bom. Hal ini dirancang untuk mengantisipasi apabila suatu saat terjadi keadaan darurat perang, misalnya Indonesia berperang dengan negara lain, maka dapat dipakai untuk kepentingan pertahanan, penyelamatan pejabat pemerintahan, evakuasi pejabat VIP/VVIP, dan untuk tempat persembunyian atau evakuasi yang aman bagi masyarakat. Selain itu, kantor pemerintahan daerah harus dirancang terowongan bawah tanah yang menghubungkan dengan markas TNI, Polri, maupun kantor pemerintahan daerah yang strategis lainnya, sehingga memungkinkan mekanisme koordinasi antara sipil dan militer ketika negara dalam keadaan darurat perang.

Demikian pula dengan pembangunan jalan tol misalnya, dimana harus ada Amdal Pertahanan. Jalan tol yang dibangun baik oleh pemerintah maupun swasta dan konsorsium jalan tol harus memenuhi Amdal Pertahanan. Artinya, jalan tol yang dibangun harus mampu dirancang untuk pendaratan pesawat tempur, *landing* dan *take off* pesawat tempur, maupun mampu dipergunakan untuk manuver / mobilitas kendaraan tempur berat, seperti tank, meriam, panser, dan kendaraan tempur berat lainnya, apabila kondisi dan situasi dalam keadaan darurat perang dengan negara lain. Hal ini sangat penting karena dalam keadaan darurat perang, sangat mungkin semua bandara lumpuh akibat dibombardir oleh negara lain ketika perang terjadi, sehingga jalan tol menjadi alternatif *landing* dan *take off* secara darurat, sebagaimana beberapa ruas jalanan di Singapura yang bisa didarati pesawat terbang / pesawat tempur untuk mengantisipasi apabila Bandara Changi hancur diserang musuh.

Dalam kaitan ini, kita semua perlu mengambil pelajaran dari Korea Selatan, dimana jalanan umum di Kota Seoul terdapat banyak jalan yang menembus bukit atau jalan terowongan yang dalam keadaan damai dipergunakan untuk kepentingan lalu lintas kendaraan bagi masyarakat umum, namun ketika negara dalam keadaan darurat, misalnya diserang oleh Korea Utara, maka jalan terowongan tersebut bisa dipakai sebagai semacam “bungker” untuk kepentingan evakuasi warga, perlindungan masyarakat maupun kepentingan pertahanan lainnya dari serangan rudal dan bom pasukan Korea Utara.

Hal yang sama juga kita perlu berkaca pada jalur terowongan yang dibangun oleh Hamas di Jalur Gaza yang membentang secara bertingkat dan berkelok-kelok di bawah tanah sepanjang kurang lebih 500 Km, menghubungkan antara wilayah perkotaan, pedesaan, perbatasan, obyek pertahanan, dan terkoneksi dengan fasilitas militer lainnya, yang selama ini dipakai sebagai tempat atau “bunker” evakuasi tentara yang terluka, tempat berlindung dari serangan rudal Israel, tempat penyimpanan amunisi / senjata, tempat menggelar perang kota dengan taktik gerilya dan metode “hit and run” melawan tentara Israel, sehingga sangat menyulitkan tentara infanteri Israel untuk menguasai wilayah Jalur Gaza dan menakhlukan pejuang Hamas.

Untuk mewujudkan sinkronisasi antara RTRW Pertahanan dengan RTRW Pembangunan, sebenarnya kawasan Ibu Kota Negara (IKN) yang ada di Propinsi Kalimantan Timur bisa dijadikan sebagai “pilot project”. IKN harus dirancang menjadi “model”, “masterpiece”, “prototipe”, dan “Best Practice” Bagi Pemda (Propinsi dan Kab/Kota) dalam sinkronisasi dan harmonisasi RTRW pertahanan dengan RTRW pembangunan. Alasannya adalah kondisi *eksisting* wilayah IKN masih lahan kosong sehingga mudah untuk mendesainnya, kawasan IKN dikelola oleh Otorita IKN (OIKN) sehingga mudah koordinasinya, ditambah komitmen pemerintah terhadap pembangunan IKN sangat besar, dan alokasi anggaran yang besar dari APBN maupun kucuran dana dari investor, baik investor dalam negeri maupun investor luar negeri (Subagyo & Madjid, 2019).

Memang sampai dengan saat ini, masih ada beberapa kendala dalam sinkronisasi antara RTRW Pertahanan dengan RTRW Pembangunan, yakni: (1) **Pemahaman Pemerintah Daerah**, dimana masih ada sebagian jajaran pemerintah daerah propinsi, kabupaten dan kota yang belum memahami RTRW Pertahanan; (2) **Pengetahuan masyarakat**, dimana masih ada sebagian masyarakat baik Ormas, LSM, maupun NGO yang belum tahu secara detail tentang RTRW Pertahanan; (3) **Partisipasi TNI**, dimana kurang dilibatkannya unsur satkowl TNI dalam menyusun RTRW Pembangunan, baik dalam forum musrenbang, penyusunan naskah akademik (Nasmik), maupun formulasi Perda, sehingga pada akhirnya RTRW Pembangunan tidak sinkron dengan RTRW Pertahanan.

#### **E. Kesiapan Sinkronisasi : Instrumental, Struktural, & Kultural**

Dalam melakukan sinkronisasi RTRW Pembangunan dengan RTRW Pertahanan, diperlukan berbagai langkah persiapan yang integral dan komprehensif, baik pada tataran komunikasi, koordinasi maupun kolaborasi. Pemerintah Daerah dan TNI merupakan elemen strategis untuk saling sinergis secara harmonis dalam mengantisipasi penataan ruang wilayah di daerah yang mampu mewartakan kepentingan “prosperity” dan kepentingan “security”. Kesiapan yang harus dilakukan untuk melakukan sinkronisasi RTRW Pembangunan dengan RTRW Pertahanan adalah sebagai berikut:

**Pertama, kesiapan instrumental.** Artinya, diperlukan payung hukum berupa MoU sinkronisasi RTRW Pembangunan dengan RTRW Pertahanan antara jajaran Pemda dengan Satkowil TNI. Misalnya di satuan TNI AD, MoU antara Pemda Propinsi, Kabupaten / Kota dengan Kodam, Korem, dan Kodim sangat mendesak dilakukan sehingga dapat menjadi dasar hukum bagi kedua belah pihak dalam melakukan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dalam penyusunan RTRW Pembangunan dengan RTRW Pertahanan Darat yang harmonis dan sinergis dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan “prosperity approach” dan kepentingan “security approach”.

**Kedua, kesiapan struktural.** Artinya, diperlukan forum komunikasi, koordinasi, dan konsultasi dalam penyusunan RTRW Pembangunan dengan RTRW Pertahanan, yang mampu menyatukan persepsi dan menyamakan pandangan antara semua pihak terkait sehingga kepentingan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan pertahanan keamanan mampu terwadahi dan terakomodasi dalam RTRW Pembangunan dan RTRW Pertahanan. Forum ini merupakan wadah untuk saling diskusi, tukar informasi, tukar data, dan tukar pengalaman antara jajaran Pemda dengan Satkowil TNI. Forum ini nantinya harus dibentuk pada tingkat Propinsi dan Kabupaten / Kota, yang melengkapi forum yang telah ada sebelumnya, seperti Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

**Ketiga, kesiapan kultural.** Artinya, diperlukan perubahan *mind set* dan *culture set* dari semua elemen bangsa bahwa urusan pertahanan tidak hanya menjadi

domain TNI semata, melainkan merupakan tanggungjawab semua komponen bangsa, termasuk Pemda Propinsi, Kabupaten, dan Kota. Jajaran Satkowil TNI harus memahami RTRW Pembangunan. Demikian pula sebaliknya, aparat birokrasi Pemerintah Daerah harus memahami RTRW Pertahanan, sehingga tercipta RTRW Pembangunan dan RTRW Pertahanan yang berbasis pada keseimbangan antara pendekatan kesejahteraan masyarakat (*prosperity approach*) dengan pendekatan pertahanan keamanan (*security approach*).

## **F. Penutup**

Berdasarkan pokok-pokok pikiran tersebut di atas, maka dalam orasi ilmiah ini, saya merekomendasikan usulan kepada pemerintah untuk diterbitkannya regulasi berupa “Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres) tentang Sinkronisasi RTRW Pertahanan dengan RTRW Pembangunan, yang disusun dengan melibatkan berbagai pihak terkait, khususnya jajaran Kementerian Pertahanan dan jajaran Kementerian Dalam Negeri, di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI, sebagai payung hukum bagi jajaran TNI dan jajaran Pemda dalam menyusun, mengimplementasikan, dan mengevaluasi RTRW Pertahanan dan RTRW Pembangunan agar berjalan secara sinkron, sinergis dan selaras.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abrahamsson, C. 2013. On the Genealogy of Lebensraum. *Geographica Helvetica*. 68 (1): 37-44
- Behr, Hartmut. 2007. Political Territoriality and De-Territorialization. *Area*. 39 (1): 112-115
- Donnelly, Jack. 2000. *Realism and International Relations*. Cambridge. Cambridge University Press.
- Gottman, Jean. 1951. Geography and International Relations. *World Politics*. 3 (2):153-154.
- Hadi, Lukito. 2009. *Penyusunan RTRW Pertahanan Darat : Masalah dan Solusi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Mabes TNI AD. 2010. *Rencana Tata Ruang Wilayah Pertahanan Darat*. Jakarta. Mabesad.

- McWilliams, Wayne C., & Piotrowski, Harry. 1990. *The World Since 1945 : A History Of International Relations*. London. Adamantine Press.
- Paleri, Prabakharan. 2008. *National Security : Imperatives and Challenges*. New Delhi. McGraw-Hill.
- Popescu, Gabriel. 2010. Deterritorialization and Reterritorialization. In Barney Wharf (Ed.), *Encyclopedia of Geography*. SAGE Knowledge.
- Puspitohadi, Wibisono. 2014. *Integrasi RTRW Pertahanan Darat dengan RTRW Kota Bandung Dalam Rangka Ketahanan Wilayah*, Tesis. Yogyakarta. UGM.
- Ramadhan, Ghifari Athallah. 2018. The Development of Concept of Territory in International Relations. *Global: Jurnal Politik Internasional*. Vol. 20: No. 2:120-135.
- Sempa, Francis. 1990. Why Teach Geopolitics?. *International Social Science Review*. 65 (1): 16-18.
- Sidaway, James. 2001. Geopolitics: Twentieth Century Spectre. *Geography*. 86 (3): 225-234
- Siltz, Anna. (2009). Why Do States has Territorial Rights?. *International Theory*. 12 (1): 185-213.
- Subagyo, Agus, 2016. Sinkronisasi RTRW Pembangunan Propinsi Jawa Barat dan RTRW Pertahanan Darat Kodam III/Siliwangi. *Jurnal Agregasi Unikom*. Vol. 4, No. 1.
- Subagyo, Agus, & Madjid, Udaya. 2019. Kaidah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pertahanan Pada Ibu Kota Baru RI. *Jurnal Widya Praja IPDN*. Vol. 45, No. 2.
- Subagyo, Agus. 2012. Integrasi dan Harmonisasi RTRW Pertahanan dengan RTRW Pembangunan. *Jurnal Jipolis*. FISIP Unjani Bandung. Vol. II, No. 4.
- Subagyo, Agus. 2013. Persepsi Pemda dan TNI AD Tentang Penataan Ruang Wilayah. *Jurnal Pertahanan*. Unhan Bogor. Vol. II, No. 2.
- Subagyo, Agus. 2015. "Sinkronisasi RTRW Pertahanan dan RTRW Pembangunan". Makalah Disampaikan Dalam Seminar Daerah dengan tema *Peran Serta Pemda Dalam Mendukung Kebijakan Pertahanan Negara Di Daerah*, yang diselenggarakan oleh Korda Kemhan Wilayah Jabar, di Aula Barat Gedung Sate Pemda Propinsi Jawa Barat. 12 November.
- Subagyo, Agus. 2015. Pendekatan Keamanan dan Pendekatan Kesejahteraan Dalam Penataan Ruang. *Harian Pikiran Rakyat*. 18 Mei.
- Syakir, Irna Irmania. 2016. *Manajemen Ruang Wilayah Indonesia*. Bandung. Penerbit Alfabeta.
- Torbjorn L, Knusten. 1992. *A History of International Relations Theory: An Introduction*. Sebastopol. CA. Palgrave Macmillan.
- Waltz, Kenneth N. 2008. *Realism and International Politics*. New York. Routledge.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. IDENTITAS DIRI

No	Unsur	Ket
1	Nama	Prof. Dr. Agus Subagyo, S.IP., M.Si
2	Tempat / Tanggal Lahir	Sukoharjo, 18 April 1978
3	Jenis Kelamin	Laki-Laki
4	Status Perkawinan	Kawin
5	Istri	Erlin Wulandari, S.IP
6	Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Latisya Aurelly Anindia Subagyo</li> <li>• Davina Valerie Queensha Subagyo</li> </ul>
7	Agama	Islam
8	Pangkat/Golongan	Pembina Tingkat I / IVb
9	Jabatan Akademik	Guru Besar / Profesor
10	NID	4121 554 78
11	NIDN	0418047801
13	No Serdos	101188915910103
14	Alamat Kantor	Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI) Jl. Terusan Jenderal Sudirman PO. Box 148 Cimahi Jawa Barat, Telp/Faks (022) 665 0645
15	Alamat Rumah	Tatar Pitaloka, Jalan Pita Asri, No 38 Kota Baru Parahyangan, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat. Kode Pos : 40553 No HP : 08121 4047 45 Email : <a href="mailto:subagyoagus1978@gmail.com">subagyoagus1978@gmail.com</a> <a href="mailto:subagyoeti@yahoo.com.au">subagyoeti@yahoo.com.au</a> <a href="mailto:agus.subagyo@lecture.unjani.ac.id">agus.subagyo@lecture.unjani.ac.id</a> Facebook : agus subagyo Twitter : subagyoagus Instagram : agussubagyo1978 Blog : <a href="http://www.agussubagyo1978.wordpress.com">www.agussubagyo1978.wordpress.com</a>

**B. ID PUBLIKASI**

No	Jenis	ID
1	Google Scholars	M3e9jEUAAAAJ
2	Sinta	5996433
3	Scopus	57226692743

**C. NIRA ASESOR**

No	Jenis	ID
1	Asesor BAN PT	NRA2023117
2	Asesor BKD Sister	9910118890401213455

**D. RIWAYAT PENDIDIKAN**

No	Perguruan Tinggi	Tahun Lulus
1	S1, Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (FISIPOL UMY)	2000
2	S2, Ilmu Politik, Konsentrasi Politik Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada (FISIPOL UGM), Yogyakarta.	2002
3	S3, Ilmu Politik, Konsentrasi Politik Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada (FISIPOL UGM), Yogyakarta.	2013

**E. RIWAYAT JABATAN AKADEMIK DOSEN (JAD)**

No	Jabatan Akademik Dosen	Tahun
1	Asisten Ahli / AA	2004
2	Lektor / L	2007
3	Lektor Kepala / LK	2014
4	Guru Besar / GB / Profesor	2023

**F. RIWAYAT PEKERJAAN / JABATAN**

No	Jabatan	Tahun
1	Staf Peneliti pada Lembaga Kajian Strategis Komunikasi Indonesia (LKsKI) Yogyakarta	1999 - 2000
2	Staf Peneliti pada Pusat Studi Perubahan Sosial dan Politik (PS - PSP) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	2000 - 2001
3	Tentor Sejarah pada Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LPPSDM) "Milineum" Yogyakarta.	2001 - 2002
4	Staf Peneliti pada Center for Democracy and Conflict Management Studies (CDCMS) Yogyakarta.	2001 - 2002
5	Staf Peneliti pada Pusat Studi Demokrasi dan Masyarakat Sipil (PSDMS) Yogyakarta.	2002 - 2003
6	Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani (FISIP UNJANI), Cimahi	2002 – sekarang
7	Staf Peneliti Pusat Studi Ilmu Pemerintahan (PSIP) Magister Ilmu Pemerintahan UNJANI Cimahi.	2002 – 2008
8	Ketua Pusat Kajian Kepemerintahan dan Kemasyarakatan (PK3) FISIP UNJANI Cimahi.	2006 - 2009
9	Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNJANI Cimahi	2010 – 2011
10	Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani (FISIP UNJANI), Cimahi	2011 – 2013
11	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani (FISIP UNJANI), Cimahi.	2012 – 2014
12	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani (FISIP UNJANI), Cimahi.	2016 – sekarang
13	Wakil Rektor I Bidang Akademik, Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI), Cimahi.	2018 – 2019
14	Wakil Rektor I Bidang Akademik, Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI), Cimahi.	2020 – sekarang



#### G. RIWAYAT ORGANISASI

No	Organisasi	Tahun
1	Pengurus Organisasi Muhammadiyah Cabang Ngampilan Yogyakarta	1996 – 2002
2	Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Yogyakarta	1996 – 2000
3	Pengurus LSM KKPA (Kelompok Kerja Pemberdayaan Agrotani) Pokja Segoro Gunung, Yogyakarta	2000 – 2002
4	Ketua LPM “Institute for Community Development “ (ICD) Cimahi - Jawa Barat	2007 – 2020

#### H. RIWAYAT MENGAJAR

No	Perguruan Tinggi / Instansi	Tahun
1	Dosen Non Organik di Sekolah Staf dan Komando TNI AD (Seskoad) Bandung.	2003 – sekarang
2	Dosen Non Organik di Sekolah Staf dan Komando TNI (Sesko TNI) Bandung.	2014 – 2016
3	Dosen Luar Biasa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlang Buana (FISIP UNLA), Bandung.	2008 – 2010
4	Dosen Non Organik di Pusat Pendidikan Intelijen (Pusdikintel) Polri, Bandung.	2008 – 2010
5	Dosen Non Organik di Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Polri, Lembang, Bandung.	2011 – 2012
6	Dosen Luar Biasa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Swadaya Gunung Jati (Unswagati / UGJ) Cirebon	2014 - 2015
7	Dosen Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan) Bogor.	2014 – 2018
8	Dosen Non Organik di Sekolah Staf dan Komando TNI AU (Seskoau) Lembang, Bandung Barat.	2016 – 2021

## I. PUBLIKASI BUKU

No	Judul Buku	Penerbit	ISBN
1	Restrukturisasi Ekonomi & Birokrasi: Kebijakan Atas Krisis Dalam Tinjauan Sistem Moneter Internasional	Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2003	979-95774-1-9
2	Pendidikan Pancasila Untuk Mahasiswa Kedokteran	Alfabeta, Bandung, 2014	978-602-289-092-8
3	Teroris (me) : Aktor dan Isu Global Abad XX	Alfabeta, Bandung, 2014	978-602-289-127-7
4	Bela Negara : Peluang dan Tantangan di Era Globalisasi	Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015	978-602-262-400-4
5	Kapita Selektif Hubungan Internasional	Alfabeta, Bandung, 2016	978-602-289-166-6
6	Aplikasi Metode Riset: Praktik Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Mix Methods	PT. Cita Intrans Selaras, Malang, 2020	978-623-7374-73-2
7	Pendidikan Keachmadyanian	Deepublish, Yogyakarta, 2021	978-623-02-2704-2
8	Teknik Analisa	Alfabeta, Bandung, 2021	978-602-289-666-1
9	Metode Penelitian Kualitatif	CV Aksara Global Akademia, Garut, 2023	978-623-8049-55-4
10	Tentara Cadangan: Pembentukan, Problematika dan Prospek	Rajawali Pers, Depok, 2023	978-623-08-0151-8
11	UU TNI: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi	Raja Grafindo Persada, Depok, 2023	978-623-08-0133-4

## J. PUBLIKASI BUKU BUNGA RAMPAI

No	Judul Bab	Judul Buku	Penerbit	ISBN
1	Bab IV: Isu Global Sebagai Alat Penetrasi Asing. Bab XVII: NGO Sebagai Agen Lokal Perang Modern	Bangsa Indonesia Terjebak Perang Modern	Seskoed, Bandung, 2004	979-99103-0-7
2	Bab I: Peran Pasukan Garuda XXXIX Dalam Menyelesaikan Konflik Bersenjata Di Republik Demokratik Kongo	Kajian Strategis Keamanan Internasional	Deepublish, Yogyakarta, 2021	978-623-02-3361-6

3	Bab 6: Diplomasi Indonesia Dalam Perjanjian FIR dengan Singapura	Isu-Isu Strategis Hubungan Internasional	Rajawali Pers, Depok, 2021	978-623-02-7039-0
4	Bagian III: Industri Hasil Tembakau (IHT): Dilema Antara “Health Security” dan “Economic Security”	Reorientasi Kebijakan Industri Hasil Tembakau (IHT)	Ellunar Publisher, Bandung, 2022	978-623-385-214-2
5	Bab 1: Diplomasi Indonesia Terhadap Akses Vaksinasi Di Masa Pandemi Covid-19 Bab 23: Analisis Kerjasama Pertahanan Indonesia-Belanda Dalam Mencapai Kepentingan Nasional Tahun 2014-2019	Isu-Isu Keamanan Hubungan Internasional	Deepublish, Yogyakarta, 2022	978-623-02-7010-9
6	Bab 5 : Strategi Buffer Zone Sebagai Soft Diplomacy Guna Meningkatkan Ketahanan Nasional Di Wilayah Perbatasan Kalimantan Utara	Konstelasi Keamanan Global	Deepublish, Yogyakarta, 2023	978-623-02-7009-3
7	Bab 26: Pengaruh Disiplin dan Motivasi Terhadap Kinerja Personel di Batalyon Perhubungan Pusat Perhubungan Angkatan Darat (Yon Pushubad)	Peran, Pengawasan dan Partisipasi	Deepublish, Yogyakarta, 2023	978-623-02-6580-8
8	Bab 17: Relevansi Lulusan SMK dengan Kebutuhan Industri Penyelenggara Jasa Otomotif di Kota Bandung Berdasarkan Permendikbud No 34 Tahun 2018	Kebijakan	Deepublish, Yogyakarta, 2023	978-623-02-6687-4
9	Bab 24: Strategi Promosi Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Di Kabupaten Bandung Barat Pada Masa Pandemi Covid-19	Strategi, Kolaborasi dan Kerjasama	Deepublish, Yogyakarta, 2023	978-623-02-6722-2

10	Bab 23: Efektivitas Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kota Tasikmalaya di Tengah Pandemi Covid-19	Pelayanan Publik, Kepemimpinan dan Pemberdayaan	Deepublish, Yogyakarta, 2023	978-623-02-7039-0
----	---	---	------------------------------	-------------------

#### K. PUBLIKASI JURNAL

No	Judul Artikel	Tahun
<b>Jurnal Internasional</b>		
1	Information Technology And Development Of Democracy In Indonesia, International Journal of Information Technology and Business Management, 15th December 2017. Vol.58 No.1, ISSN 2304-0777, Scopus Q4.	2017
2	The Implementation Of The Pentahelix Model For The Terrorism Deradicalization Program In Indonesia, Cogent Social Sciences (2021), 7: 1964720, Scopus Q2. <a href="https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1964720">https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1964720</a>	2021
3	Reserves Force Formation Policy: Opportunities, Challenges, and Potentials, Res Militaris, Vol.12, No 2, Summer-Autumn 2022, Scopus Q3.	2022
4	TNI in Defense Diplomacy: Strengthening International Military Cooperation”, Central European Management Journal, Vol. 31 Iss. 1 (2023), ISSN:2336-2693   E-ISSN:2336-4890 ISSN:2658-0845   E-ISSN:2658-2430. SJR Q3 (0.22), Scopus Q3.	2023
<b>Jurnal Nasional</b>		
1	Ekonomi Islam : Pencarian Paradigma dan Perbandingan dengan Ekonomi Kapitalis & Sosialis, Majalah Kartika Wijaya Kusumah, Vol. 12 No.1, ISSN : 0854-7572	2003
2	Genealogi Pembangunan : Membongkar Positivisme Wacana Pembangunan Di Dunia Ketiga, Majalah Kartika Wijaya Kusumah, Vol. 12 No.1, ISSN : 0854-7572	2004
3	Kebangsaan Multikultural : Strategi Menghadapi Disintegrasi Bangsa, Majalah Karya Vira Jati, No.106/2004, ISSN : 0216.1257	2004
4	Merumuskan Kembali Hakekat Ancaman Nasional, Majalah Karya Vira Jati, No.107/2004, ISSN : 0216.1257	2004
5	Tinjauan Konseptual tentang Pemilu dan Demokrasi dalam Sistem Politik Indonesia, Jurnal Jipolis, Vol. 1, No. 1, ISSN : 1829-6777	2005

6	Mengurai Relasi Negara dan Swasta dalam Pembangunan, Jurnal Jipolis, Vol. 1, No. 2, ISSN : 1829-6777	2005
7	Dua Aras Desentralisasi : Sketsa Filosofis, Catatan Masa Lalu dan Tantangan Ke Depan, Majalah Kartika Wijaya Kusumah, Vol. 13 No.1, ISSN : 0854-7572	2005
8	Community Policing : Paradigma Baru Polri Di Era Reformasi, Jurnal Jipolis, Vol. 1, No. 3, ISSN : 1829-6777	2005
9	Relasi Negara dan Swasta Dalam Pembangunan, Jurnal Governance, Vol. 1, No. 4, Oktober-Desember 2005, ISSN : 1829-7544	2005
10	Visi Indonesia 2025, Jurnal Tantangan Pembangunan, Seskoad, Edisi 12, ISSN : 0216.1454	2005
11	Kebijakan Publik dalam Perspektif Studi Hubungan Internasional, Jurnal Jipolis, Vol. 2, No. 1, ISSN : 1829-6777	2006
12	TNI AD Sebagai Pelayan Publik Sektor Pertahanan Darat, Majalah Karya Vira Jati, No.109/2006, ISSN : 0216.1257	2006
13	Merumuskan Kebijakan Pertahanan RI, Majalah Kartika Wijaya Kusumah, Vol. 14 No.2, ISSN : 0854-7572	2006
14	Privatisasi Pelayanan Publik : Mungkinkah?, Jurnal Governance, Vol. 2, No. 8, ISSN : 1829-7544, SINTA 4	2006
15	Pasar Tradisional Versus Pasar Modern : Melacak Jejak Agresivitas Kapitalisme Hipermarket, Jurnal Jipolis, Vol. 2, No. 3, ISSN : 1829-6777	2006
16	Industri Pertahanan Dalam Konteks Sistem Pertahanan Negara, Jurnal Jipolis, Vol. 3, No. 8, ISSN : 1829-6777	2007
17	Wawasan Kebangsaan Di Era Globalisasi, Jurnal Jipolis, Vol. 3, No. 3, ISSN : 1829-6777	2007
18	Kebijakan dan Strategi Pertahanan RI, Majalah Gema Infanteri Pusenif TNI AD, Edisi 77 – Juli 2007, ISSN : 1851-7421	2007
19	Mengurai Konsepsi Corporate Social Responsibility (CSR), Jurnal Jipolis, Vol. 4, No. 1, ISSN : 1829-6777	2008
20	Sistem Pertahanan Semesta Di Daerah Perbatasan, Jurnal Jipolis, Vol. 4, No. 2, ISSN : 1829-6777	2008
21	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah : Tinjauan EKPPD, EKPOD, dan EDOB, Jurnal Public Sphere UNPAD, ISSN : 1978-5593, SINTA 5	
22	Kebijakan dan Strategi Potensi Pertahanan Negara, Jurnal Jipolis, Vol. 5, No. 3, ISSN : 1829-6777	2009
23	Reformasi Sistem Rekrutmen Pegawai Negeri Di Korea Selatan : Belajar Meritokrasi Dari Negeri Ginseng, Jurnal Civil Service BKN, ISSN : 1978-7103	
24	TNI AD Sebagai Benteng Terakhir Bangsa, Majalah Gema Infanteri Pusenif TNI AD, Edisi Khusus Desember 2009, ISSN : 1871-6691	2009

25	Implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2004-2009, Jurnal JIPOLIS, ISSN: 1829-6777 Vol. 6 No. 1 (Januari 2010).	2010
26	Analisis Kelayakan Pemekaran Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, Jurnal JIPSI FISIP UNIKOM, ISSN: 2086-1109 / Vol. II No. 1 /Desember 2010, SINTA 4	2010
27	Alternative Dispute Resolution (ADR): Definisi, Implementasi dan Aksi, Jurnal JIPOLIS, ISSN : 1829-6777 Vol. 7 No. 1 (Januari 2011).	2011
28	Peredaran Senjata Api Ilegal Di Indonesia, Jurnal JIPOLIS, ISSN: 1829-6777 Vol. 7 No. 3 (September 2011)	2011
29	Transformasi Bisnis TNI, Jurnal JIPOLIS, ISSN: 1829-6777 Vol. 7 No. 3 (Mei 2011)	2011
30	"The Great Debate" Dalam Hubungan Internasional, Kartika Wijaya Kusumah, ISSN 0854-7572 Vol. 20 No.2, Edisi November 2012	2012
31	Penyelundupan Manusia dan Ancaman Keamanan Maritim Indonesia, Jurnal Pertahanan Unhan, Vol 3 / No 3 / Desember 2013. ISSN: 2087-9415, SINTA 3	2013
32	Kesiapan Daerah Dalam Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia, Jurnal Kybernologi Unla, Vol 3/No. 1/ 2015. ISSN: 2338-0462, SINTA 5	2015
33	Sinergi Dalam Menghadapi Ancaman Cyberwarfare, Jurnal Pertahanan Unhan, Vol 5 / No 1 / April 2015. ISSN: 2087-9415, SINTA 4	2015
34	Syarat-Syarat Kesiapan Penyelenggaraan Bela Negara, Jurnal Pertahanan Unhan, Vol 5 / No 3 / Tahun 2015. ISSN: 2087-9415, SINTA 4	2015
35	Penyusunan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi (JIPSI) Unikom Bandung, Vol 6 / No. 1, ISSN: 2086-1109, SINTA 3	2016
36	Pemberdayaan Babinsa Dalam Mencegah Aksi Radikalisme, Jurnal Karya Virajati Seskoad, Vol 1 / No. 2 / Tahun 2016. ISSN: 0216.1257.	2016
37	Sinkronisasi RTRW Pembangunan Propinsi Jawa Barat dengan RTRW Pertahanan Darat Kodam III/Siliwangi, Jurnal Agregasi Unikom, Vol 4/ No.2/Tahun 2016. ISSN : 2337-5299, SINTA 3	2016
38	Studi Hubungan Internasional di Indonesia, Jurnal Dinamika Global 1 (02), 2-23, SINTA 5	2016
39	Mewujudkan Profesionalisme TNI AD Di Era Reformasi, Jurnal Karya Virajati Seskoad Bandung, Edisi 02, ISSN: 0216.1257.	2017
40	Mewujudkan Profesionalisme TNI AD Di Era Reformasi, Jurnal Karya Virajati Seskoad Bandung, Edisi 02, ISSN: 0216.1257	2017

41	Information Technology And Development Of Democracy In Indonesia, International Journal of Social Sciences, Volume 58 / Nomor 1, ISSN: 2305-4557	2017
42	Sinkronisasi RTRW Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan RTRW Pertahanan Darat Kodam III/Siliwangi, Jurnal Agregasi 4 (2), SINTA 3	2017
43	Kepemimpinan Nasional Untuk Generasi Milenial Di Era Digital, Jurnal Caraka Prabu, Vol 1 No 2, 2017, <a href="https://doi.org/10.36859/jcp.v1i2.94">https://doi.org/10.36859/jcp.v1i2.94</a> . SINTA 5	2017
44	Faktor-Faktor Penghambat ASEAN Intergovernmental Commission On Human Rights (AICHR) Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Asia Tenggara, Jurnal Dinamika Global 2 (01), 48-81, Juni 2017, SINTA 5	2017
45	Pola Hubungan Patronase Pada Birokrasi Pemerintahan Kota Cimahi, Jurnal Caraka Prabu / Articles, Vol 1 No 01 (2017), DOI: <a href="https://doi.org/10.36859/jcp.v1i01.49">https://doi.org/10.36859/jcp.v1i01.49</a> , SINTA 5	2017
46	Kepemimpinan Nasional Untuk Generasi Milenial Di Era Digital, Jurnal Caraka Prabu, Vol 1 No 2, 2017, <a href="https://doi.org/10.36859/jcp.v1i2.94">https://doi.org/10.36859/jcp.v1i2.94</a> . SINTA 5	2017
47	Sinergi TNI Angkatan Darat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Alam, Transformasi : Jurnal Manajemen Pemerintahan, 131-141, SINTA 5	2018
48	Sinergi TNI AD Dengan POLRI Dan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Konflik Sosial (Studi Kasus Di Kota Tarakan), Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja 8 (2), 113-126, SINTA 5	2018
49	Peran TNI Dalam Mengamankan Wilayah Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia, Insignia : Journal Of International Relations 8 (1), 19-36. SINTA 4	2019
50	Rencana Aksi Nasional Bela Negara, Jurnal Academia Praja 2 (01), 1-16. SINTA 3	2019
51	Media Sosial Dalam Hubungan Internasional, Jurnal Dinamika Global 4 (01), 3-23. SINTA 5. DOI: <a href="https://doi.org/10.36859/jcp.v1i2.94">https://doi.org/10.36859/jcp.v1i2.94</a> . SINTA 5	2019
52	Kaidah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pertahanan Pada Ibu Kota Baru Republik Indonesia, Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, Volume 45, No. 2, Oktober 2019: 177 - 188  p-ISSN: 0216-4019, e-ISSN: 2614-025X, DOI: <a href="https://doi.org/10.33701/jipwp.v45i2.692">10.33701/jipwp.v45i2.692</a> , SINTA 3	2019
53	Pola Hubungan Patronase Dalam Birokrasi Pemerintahan Daerah Kota Bandung, Jurnal Academia Praja 2 (01), 102-119. SINTA 3	2019
54	Implementasi Pancasila Dalam Menangkal Intoleransi, Radikal Dan Terorisme, Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila dan Kewarganegaraan, 6 (1), 10-24. DOI: <a href="https://doi.org/10.29100/jr.v6i1.1509">https://doi.org/10.29100/jr.v6i1.1509</a> . SINTA 4	2020

55	Implication of Covid-19 Pandemic Towards Economic Policy In Southast Asia, Journal of International Relation vol. 3 No. 2. SINTA 5	2020
56	Realisme Dalam Kepentingan Nasional Indonesia Melalui Forum Konferensi Asia Afrika (KAA) dan Gerakan Non Blok (GNB), Jurnal Dinamika Global 5 (01), 123-139. SINTA 5	2020
57	Japan's Defense Strategy: The Alternative For The Dynamic Asian Pacific, Available online at: <a href="http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/ks">http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/ks</a> Khazanah Sosial, Vol. 2, No. 1: 37-48. SINTA 2	2020
58	Sinergi Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan dalam Politik Luar Negeri Indonesia, Indonesian Perspective, Vol. 5, No. 1 (Januari-Juni 2020): 72-91. E-ISSN: 25481436. SINTA 3	2020
59	Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Rangka Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma 2 (1), 65-77. SINTA 4	2021
60	Entrepreneurship Development in Management of Intra School Student Organizations in SMA/SMK Level in the East Indonesian Province, ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat 4 (2), 1099-1106	2021
61	Peran Kodim 0506/Tangerang Dalam Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Guna Mengamankan Pilkada Serentak Tahun 2020, Jurnal Academia Praja 4 (2), 358-379, SINTA 3	2021
62	Peran Kodim 0818/Malang-Batu Dalam Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Guna Mengamankan Pilkada Serentak Di Kabupaten Malang Tahun 2020, Jurnal Caraka Prabu Vol.5 No. 1 Juni 2021, SINTA 5	2021
63	Peran Kodim 0506/Tangerang Dalam Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Guna Mengamankan Pilkada Serentak Tahun 2020, Jurnal Caraka Prabu, Vol 5 No 1, 2021, SINTA 5	2021
64	Kepentingan Nasional Indonesia Menolak Ratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), Global Political Studies Journal, Volume 6 Nomor 2 Edisi Oktober 2022.  P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905  DOI 10.34010/gpsjournal.v6i2 SINTA 5	2022
65	Analisis Pembinaan Teritorial di Kodam III/Siliwangi dalam Menghadapi Hakekat Ancaman, Jurnal Academia Praja, Volume 5 No 2. P-ISSN 2614-8692; E-ISSN 2715-9124	2022



	<a href="https://doi.org/10.36859/jap.v5i2.1121">https://doi.org/10.36859/jap.v5i2.1121</a> <a href="https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-academia-praja">https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-academia-praja</a> . SINTA 3	
66	Bureaucratic Reform Strategy In Improving The Quality Of Public Services By Implementing Bureaucratic Communication Model in Cimahi City, PERSPEKTIF, 11 (3) (2022): 963-969, DOI: 10.31289/perspektif.v11i3.6264, SINTA 3	2022
67	Asean 4.0. Era: Development In Digital Economy And Trade Sector, Jurnal Dinamika Global Vol.7 No. 2, Desember 2022  P-ISSN 2548-9216   E-ISSN 2684-9399, SINTA 5	2022
68	Cooperation of Regional Military Command III/Siliwangi with Regional Governments in Accelerating Covid-19 Vaccination In the Province of West Java, Indonesia, Jurnal Academia Praja, Volume 6 No 2,  <a href="https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnalacademia-praja">https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnalacademia-praja</a> P-ISSN 2614-8692, E-ISSN 2715-9124, <a href="https://doi.org/10.36859/jap.v6i2.1730">https://doi.org/10.36859/jap.v6i2.1730</a> , SINTA 3	2023

#### L. PUBLIKASI PROSIDING KONFERENSI INTERNASIONAL

No	Judul Artikel	Tahun
1	Bureaucracy Reform Strategy Of The Local Government In Cimahi City Towards Globalization Era, Prosiding International ICOGISS 2019, 615-627	2019
2	Perception Of Society Against State Defence (Case Study In West Java Province), Proceeding of 1st International Conference on Social Science (ICoSS) ICMI Muda Bandung, 26 th August 2019, ISSN 2715-2030, Terindeks Web of Science (WoS).	2019
3	The Policy of the Military District Command 0609 / Cimahi in Helping Local Governments to Handle Covid-19 Pandemic, Proceedings of the 2nd International Conference on Administration Science 2020 (ICAS 2020), Terindeks Web of Science (WoS).	2020
4	Policy on Territorial Development of Military District Command 0622/Sukabumi Regency in Assisting Local Governments for National Economic Recovery after the Covid-19 Pandemic, Proceedings of the 4rd International Conference on Administration Science 2022 (ICAS 2022), Terindeks Web of Science (WoS).	2022

5	The Role of Local Government in Enviromental Management in Bandung Regency, Prosiding International Conference on Social, Politics, Administration, and Communication Sciences (ICoSPACS), FKDKISIP, 2022, Terindeks Web of Science (WoS).	2022
---	--	------

**M. PUBLIKASI ARTIKEL DI KORAN / SURAT KABAR**

No	Judul Artikel	Tahun
1	“Konflik Politik dan Kekerasan Kolektif”, Radar Yogya (Group Jawa Pos)	2001
2	“Disintegrasi dan Image Comunities”, Radar Yogya (Group Jawa Pos)	2001
3	“Reformasi dan Demokratisasi di Alam Kekerasan”, Radar Yogya (Group Jawa Pos)	2001
4	“Radikalisme Etnik dan Pudarnya Hegemoni Negara”, Radar Yogya (Group Jawa Pos)	2001
5	“Demokrasi Substansial Vs Demokrasi Prosedural : Relevansinya Untuk Indonesia”, Radar Yogya (Group Jawa Pos)	2001
6	“Korupsi : Kultural atau Struktural”, Radar Jogja (Group Jawa Pos)	2001
7	“Mencari Format Ideal Birokrasi Publik”, Radar Jogja (Group Jawa Pos)	2001
8	“Pemerintahan Baru dan Politik Luar Negeri” Bagian 1, Radar Jogja (Group Jawa Pos)	2001
9	“Pemerintahan Baru dan Politik Luar Negeri” Bagian 2, Radar Jogja (Group Jawa Pos)	2001
10	“Akar Masalah Konflik Aceh”, Radar Jogja (Group Jawa Pos)	2001
11	“Amerika Serikat dan Ideologi Politik Realis”, Bagian 1, Radar Jogja (Group Jawa Pos)	2001
12	“Amerika Serikat dan Ideologi Politik Realis” Bagian 2, Radar Jogja (Group Jawa Pos)	2001
13	“Materialisme Pembangunan dan Humanisasi Pembangunan”, Radar Jogja (Group Jawa Pos)	2001
14	“Korupsi dan Rent-Seeking Society” Bagian 1, Radar Jogja (Group Jawa Pos)	2001
15	“Konflik Politik, Kekerasan Kolektif & Kerusuhan Massal”, KOMPAS	2001
16	“Memasukkan Etika Dalam Ilmu Ekonomi”, KOMPAS	2001
17	“Fundamentalisme Pasar Versus Masyarakat Terbuka”, KOMPAS,	2001
18	“Multikulturalisme di Tengah Kultur Monolitik dan Uniformitas Global”, KOMPAS	2001
19	“Mengurai Gagalnya Negara Pembangunan”, KOMPAS	2001

20	“Korupsi dan Rent-Seeking Society” Bagian 2, Radar Jogja (Group Jawa Pos)	2002
21	, “Perpecahan Partai Politik : Siapa Yang Diuntungkan?” Bagian 1, Radar Jogja (Group Jawa Pos)	2002
22	“Perpecahan Partai Politik : Siapa Yang Diuntungkan?” Bagian 2, Radar Jogja (Group Jawa Pos)	2002
21	“Modernitas, Humanisme dan Krisis Kemanusiaan”, Radar Jogja (Group Jawa Pos)	2002
22	“Republik Bulog”, Bernas	2002
23	“Etos Kerja, Korsel dan Piala Dunia 2002”, Bernas	2002
24	“Satu Tahun Tragedi WTC 11 September 2001”, Pikiran Rakyat	2002
25	“AS, Irak dan Ancaman Perang Teluk”, Pikiran Rakyat	2002
26	“Teritorial TNI di Era Otonomi Daerah”, Pikiran rakyat	2002
27	“Terorisme Dalam Hubungan Internasional”, Pikiran Rakyat	2002
28	“Ancaman Kemacetan Ilmu-ilmu Sosial”, Pikiran Rakyat	2002
29	“Ambisi Bush Ingin Melebihi Ayahnya”, Pikiran Rakyat	2002
30	“Menelanjangi Kapitalisme Global”, Pikiran Rakyat	2003
31	“Negara Palestina Merdeka Tahun 2005?”, Pikiran Rakyat	2003
32	“PTN, Jalur Khusus dan Kesalahan Pemerintah”, Pikiran Rakyat	2003
33	“Konspirasi Antara Kuasa, Wacana dan Seks”, Pikiran Rakyat	2003
34	“Memasyarakatkan Pemilu atau Memilukan Masyarakat”, Pikiran Rakyat	2003
35	“Hedonisme Politik di Tanah Sunda”, Pikiran Rakyat	2004
36	“Konstelasi Politik Menak, Inohong, dan Kaum Intelektual di Tatar Sunda, Pikiran Rakyat	2005
37	“Politik Lokal Di Jawa Barat”, Pikiran Rakyat	2006
38	“Politik Kesundaan Di Tengah Politik Nasional”, Pikiran Rakyat	2006
39	“Pendidikan Pemilih Dalam Pilkada di Kota Cimahi”, KOMPAS	2007
40	“Global Governance : Sketsa Masa Depan Global”, KOMPAS	2007
41	“Radikalisme, Etnisitas dan Terorisme”, KOMPAS	2007
42	“Terorisme Global : Ancaman Baru Dalam Konstelasi Percaturan Internasional”, KOMPAS	2007
43	“Penanganan Konflik Internasional”, Bernas	2008
44	“Analisis Anarkisme Internasional dan Posisi Indonesia” Kedaulatan Rakyat	2008
45	“Konstelasi Kepemimpinan Indonesia Dalam ASEAN”, Kedaulatan Rakyat	2009
46	“Sketsa Indonesia Dalam Pusaran Global”, Bernas	2010

**N. RIWAYAT DALAM POKJA PEMERINTAH (K/L)**

No	Judul Kelompok Kerja (Pokja)	Tahun
1	Anggota, Kebijakan dan Strategi Pertahanan dan Keamanan guna Menangani Masalah Keamanan Nasional Di Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar Tahun 2007, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolkumham) RI	2007
2	Anggota, Kebijakan Sistem Keamanan Dan Ketahanan Masyarakat Dalam Membangun Kondusifitas Wilayah Negara Tahun 2008, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolkumham) RI	2008
3	Anggota, Tim Kerja Pendirian Lembaga Pendidikan Pascasarjana Pertahanan / Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan), Kementerian Pertahanan RI, 2008.	2008
4	Koordinator Pelaksana, Survei LGPMS (Local Government Performance Measurement System), ADB GRANT: INO-39371-01, Tahun 2008, International Projects Partnership (IPP) Consultant di Perancis dan Project Management Office ADB Kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri RI	2008
5	Anggota, Pelaksanaan, Pemajuan, Penegakan, Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia, Tahun 2009, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolkumham) RI	2009
6	Anggota, Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (Studi Kasus di Pemda Kabupaten Cilacap), Tahun 2010, BNP2TKI RI	2010
7	Anggota, Penyusunan Standar Penilaian Kinerja PPTKIS Dalam Penempatan dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri Tahun 2011, BNP2TKI RI	2011
8	Anggota, Penyusunan Norma, Standar, dan Indeks Kinerja Babinkamtibmas di Lingkungan Polri Tahun 2013, Sespim Polri, Lembang.	2013
9	Anggota, Pelaksanaan Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan di Indonesia Tahun 2015, Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI	2015
10	Anggota, Evaluasi Kebijakan Deradikalisasi Terorisme Tahun 2016, Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI	2016
11	Anggota, Telaah Kritis Intoleransi, Radikalisme, dan Terorisme tahun 2017, Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI	2017

12	Anggota, Kajian Percepatan Pengesahan RUU Komponen Cadangan & Komponen Pendukung Dalam Rangka Ketahanan Nasional Tahun 2018, Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas) RI.	2018
13	Anggota, Model Pengelolaan Wilayah Perbatasan Berbasis Prosperity & Security Tahun 2018, Kementerian Dalam Negeri RI	2018
14	Anggota, Harmonisasi RTRW Pertahanan dengan RTRW Pemerintah Di Tingkat Propinsi dan Kabupaten / Kota Tahun 2019, Bappenas RI	2019
15	Anggota, Model dan Kebijakan Penanganan Konflik di Papua Dalam Perspektif Sishanta Tahun 2020, Ditjianbang Seskoad Bandung	2020
16	Anggota, Hubungan Resiprokal Antara Karakter Kepemimpinan Dengan Kemampuan Manajerial Dalam Pelaksanaan Pembinaan Satuan Tahun 2020, Ditjianbang Seskoad Bandung	2020
17	Anggota, Kajian Kawasan Perbatasan Darat RI-Malaysia Ditinjau Dari Aspek Pertahanan Keamanan (Studi Kasus di Propinsi Kalimantan Barat & Kalimantan Utara) Tahun 2020, Ditjianbang Seskoad Bandung	2020
18	Anggota, Pelaksanaan Binter TNI AD Dalam Penanganan Derdikalisasi Di Dalam Negeri Tahun 2021, Ditlitbang Pusat Teritorial TNI AD (Pusterad)	2021
19	Anggota, Efektifitas Binter TNI AD Pada Era Bonus Demografi Tahun 2021, Ditlitbang Pusat Teritorial TNI AD (Pusterad)	2021
20	Anggota, Standarisasi Keberhasilan Tugas Satuan Komando Kewilayahan (Satkowl) TNI AD Tahun 2021, Ditlitbang Pusat Teritorial TNI AD (Pusterad)	2022

#### O. KEANGGOTAAN ASOSIASI PROFESI

No	Asosiasi Profesi	Tahun
1	Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI)	2005
2	Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII)	2010
3	Komunitas Ilmu Pertahanan Indonesia (KIPI)	2012
4	Indonesian Research Methodology Lecturer Association (IRMLA)	2018
5	Persatuan Dosen Perguruan Tinggi Nusantara (PDPTN)	2019
6	Forum Komunikasi Dekan / Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik PTS Se-Indonesia (FK-DKISIP)	2020
7	Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI)	2023

**P. PENGHARGAAN**

<b>No</b>	<b>Penghargaan</b>	<b>Tahun</b>
1	Penghargaan Kesetiaan 10 Tahun, Unjani	2013
2	Penghargaan Kesetiaan 20 Tahun, Unjani	2023
3	Penghargaan Satya Lencana Dwidya Sista, Seskoad, Bandung	2020